

KONSEP PENGANGGARAN BIAYA PENDIDIKAN

Abdul Wakhid

STKIP Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal

Email: nomerwakhid@gmail.com

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Diterima 2 Agustus 2020 Diterima dalam bentuk revisi 15 Agustus 2020 Diterima dalam bentuk revisi 20 Agustus 2020	Konsep penganggaran dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan. Pembiayaan pendidikan merupakan komponen yang esensial dan tidak dapat terpisahkan dalam penyelenggaraan proses belajar-mengajar. Dalam rangka pembentukan potensi sumber daya manusia (SDM), penggunaan anggaran pendidikan yang efektif dan efisien diharapkan dapat menghasilkan SDM yang tepat guna dan berhasil guna. Komponen keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan belajar mengajar. Dengan kata lain setiap kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan biaya. Komponen keuangan dan pembiayaan ini perlu dikelola dengan sebaik-baiknya supaya dana-dana yang ada dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran dan optimal untuk menunjang tujuan pendidikan.
Kata kunci: Konsep; Penganggaran dan Biaya Pendidikan	

Pendahuluan

Perkembangan teknologi dan informasi khusus yang terjadi di Indonesia terjadi sangat dinamis. Perkembangan tersebut tentu saja berdampak pada segala bidang, seperti ekonomi, kesehatan, sosial dan tentunya pada bidang pendidikan (Cholik, 2017).

Pendidikan sebagai salah satu wadah pembinaan dan pengembangan diri generasi muda merupakan aspek yang perlu diperhatikan. Melalui dunia pendidikan segala potensi yang ada didalam diri seperti minat, bakat, dan kemampuan generasi muda dipupuk dan dikembangkan sebagai bekalnya sekarang dan masa yang akan datang, termasuk dalam memahami, menghadapi, menerima, dan mengalami segala perbedaan (kemajemukan) yang ada disuatu masyarakat sehingga pendidikan yang berwawasan keanekaragaman atau pendidikan

multikultural dapat menjadi sebuah paradigma yang dapat meminimalisir bahkan mengurangi ketegangan yang timbul karena tidak adanya rasa saling pengertian, toleransi, dan kesediaan dalam menerima sebuah perbedaan (Aditya & Qomariyah, 2020).

Pendidikan karakter pun dapat dimaknai sebagai pendidikan yang mengedepankan nilai, budi pekerti, akhlak, moral, maupun watak, yang pada akhirnya memiliki tujuan untuk menumbuhkan keterampilan peserta didik untuk menentukan keputusan baik-buruk, memelihara apa yang baik menghindari dan menjauhi apa yang dianggap buruk dan merugikan, mewujudkan, dan menebar kebaikan (Saepudin, 2018).

Pendidikan dapat dilihat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis pendidikan dapat dimaknai sebagai upaya untuk mendewasakan manusia, sementara itu secara praktis pendidikan akan terlihat dari

kelembagaannya, yang menurut Undang - undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 terdapat tiga lingkungan pendidikan yaitu pendidikan informal, pendidikan non formal, dan pendidikan formal. Dilihat dari sudut ketaraturan kelembagaan, pendidikan nonformal dan pendidikan formal tampaknya lebih memungkinkan untuk diorganisasi secara baik dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen dalam berbagai fungsinya, sehingga analisis dan tinjauan terhadap proses penyelenggaraanya akan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pengembangan kelembagaan dalam proses pendidikan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan.

Peningkatan kualitas pendidikan bukanlah tugas yang ringan karena tidak hanya berkaitan dengan permasalahan teknis, akan tetapi mencakup berbagai persoalan yang sangat rumit dan kompleks, seperti perencanaan, pendanaan, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan sistem pendidikan, dan peningkatan kualitas pendidikan juga menuntut manajemen yang baik dan profesional.

Untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas perlu adanya pengelolaan secara menyeluruh dan profesional terhadap sumber daya yang ada dalam lembaga pendidikan. Salah satu sumber yang perlu dikelola dengan baik dalam lembaga pendidikan adalah masalah keuangan.

Kemudian salah satu indikator tingginya kualitas pembelajaran dalam pendidikan adalah pengelolaan kelas yang efektif merupakan persyaratan mutlak bagi terjadinya proses belajar mengajar. Mengajar pada prinsipnya membimbing siswa dalam kegiatan belajar mengajar atau mengandung pengertian bahwa mengajar merupakan suatu usaha pengorganisasian lingkungan dalam hubungannya dengan anak didik dan bahan pengajar yang menimbulkan proses belajar (Mairani, 2019).

Pembelajaran pada dasarnya merupakan upaya untuk mengarahkan anak didik ke dalam proses belajar sehingga mereka dapat memperoleh tujuan belajar sesuai dengan apa yang diharapkan. Pembelajaran hendaknya memperhatikan kondisi individu anak karena merekalah yang akan belajar. Guru merupakan sumber daya edukatif sekaligus aktor proses pembelajaran yang utama dalam proses belajar mengajar disekolah (Harianti, 2020).

Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu dengan penelitian deskriptif melalui metode *library research* melalui kajian-kajian terhadap, peraturan-peraturan dan hal-hal yang berkaitan dengan tema permasalahan, sehingga didapat pemahaman komprehensif tentang konsep anggaran dan pembiayaan dalam pendidikan.

Hasil dan Pembahasan

A. Konsep penganggaran biaya pendidikan

Untuk mencapai sasaran berbagai kegiatan dibidang pendidikan baik yang diselenggarakan di sekolah maupun luar sekolah sangat tergantung kepada pembiayaan guna membiayai berbagai kegiatan tersebut.

Penegakan hukum merupakan kegiatan untuk menyeraskan hubungan antar nilai - nilai yang terjabarkan dalam sikap tindak dan kaidah-kaidah mantap sebagai suatu rangkaian penjabaran nilai tahap akhir (Wicaksono et al., 2020).

Menurut (Fattah, 2000) penganggaran merupakan kegiatan atau proses penyusunan anggaran (*Budget*). *Budget* merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dengan bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu,

dalam anggaran tergambar kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu lembaga.

Sedangkan menurut (Mac Donald & Lawton, 1977) anggaran adalah sejenis rencana yang menggambarkan rangkaian tindakan atau kegiatan dalam bentuk angka-angka dari segi uang untuk suatu jangka waktu tertentu.

Dari pengertian diatas, tampak bahwa penganggaran dan anggaran tidak semata-mata berkaitan dengan uang, namun juga memberi gambaran tentang program kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam anggaran kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan disertai dengan besarnya biaya atau dana yang akan digunakan, sehingga terdapat dua hal yang perlu mendapatkan perhatian besar yaitu besarnya dana untuk membiayai kegiatan yang akan dilaksanakan serta kegiatan yang akan dilaksanakan.

Dapat disimpulkan bahwa anggaran pendidikan adalah rencana keuangan yang akan digunakan untuk suatu kegiatan yang telah disusun untuk jangka waktu tertentu.

1. Karakteristik Anggaran

Anggaran pada dasarnya terdiri dari dua sisi yaitu sisi penerimaan dan sisi pengeluaran. Sisi penerimaan biaya ditentukan oleh besarnya dana yang diterima oleh lembaga dari setiap sumber dana. Biasanya dalam pembahasan pembiayaan pendidikan, sumber-sumber biaya itu dibedakan dalam tiap golongan, pemerintah, masyarakat, orang tua dan sumber-sumber lain.

Besarnya biaya pendidikan yang bersumber dari pemerintah ditentukan berdasarkan kebijakan keuangan pemerintah ditingkat pusat dan daerah setelah mempertimbangkan skala prioritas. Besarnya penerimaan dari masyarakat baik perorangan, maupun lembaga, yayasan yang berupa uang tunai, barang, hadiah atau pinjaman bergantung pada kemampuan lembaga dan masyarakat setempat dalam memajukan

pendidikan. Besarnya dana yang diterima dari orang tua berupa iuran BP3 (Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan) dan SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) yang langsung diterima sekolah didasarkan atas kemampuan orang tua murid dan ditentukan oleh lembaga itu sendiri. Sedangkan penerimaan dari sumber-sumber lain termasuk dalam golongan ke tiga yaitu adanya bantuan atau pinjaman dari luar negeri yang diperuntukkan bagi pendidikan.

Dalam setiap anggaran tergambar dua sisi penting yaitu sisi penerimaan dan sisi pengeluaran. Sisi penerimaan menunjukkan sumber-sumber dari mana dana itu diperoleh apakah dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, dari orang tua, dari masyarakat, atau sumber lain yang dibenarkan, sedangkan sisi pengeluaran menggambarkan alokasi besarnya biaya pendidikan untuk setiap komponen yang harus dibiayai (Fattah, 2000).

Sisi pengeluaran terdiri dari alokasi besarnya biaya pendidikan untuk setiap komponen yang harus dibiayai. Dari seluruh penerimaan, sebagian dipergunakan untuk membiayai kegiatan administrasi, ketatausahaan, sarana prasarana pendidikan, dan sebagian diberikan kepada kepala sekolah melalui beberapa saluran. Selain anggaran rutin terdapat anggaran proyek yang setiap tahun disalurkan oleh Departemen Pendidikan dengan kebutuhan sekolah-sekolah. Anggaran rutin pemerintah pusat dibiayai seluruhnya dari penerimaan pajak, sedangkan anggaran proyek dibiayai dari surplus anggaran rutin.

Dalam pembahasan pengeluaran, istilah-istilah yang digunakan adalah

1. *Recurrent Expenditure*

Yaitu pengeluaran rutin atau yang bersifat berulang tiap-tiap tahun, seperti gaji, barang yang harus sering diganti.

2. *Capital Expenditure*

Yaitu pengeluaran untuk barang-barang yang tahan lama, seperti gedung

sekolah, laboratorium, sarana olahraga, dan lain sebagainya.

2. Fungsi Anggaran

Anggaran disamping sebagai alat untuk perencanaan dan pengendalian, juga merupakan alat bantu bagi manajemen dalam mengarahkan suatu lembaga menempatkan organisasi dalam posisi yang kuat atau lemah. Anggaran dapat dipergunakan untuk melihat apakah program kegiatan terlaksana dengan baik serta apakah penggunaan dana untuk membiayai program tersebut sesuai, efektif, dan efisien. Oleh karena itu, anggaran juga dapat berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Apabila melihat perkembangannya, anggaran mempunyai fungsi sebagai alat penaksir, sebagai alat otoritas pengeluaran dana dan sebagai alat efisiensi.

Anggaran sebagai alat efisiensi merupakan fungsi yang paling esensial dalam pengendalian. Dari segi pengendalian jumlah anggaran yang didasarkan atas angka-angka standart dibandingkan dengan realisasi biaya yang melebihi atau kurang, dapat dianalisis ada tidaknya pemborosan.

3. Prinsip-Prinsip dan Prosedur Penyusunan Anggaran

Anggaran harus disusun berdasarkan prinsip-prinsip yang ada. Diantaranya adalah prinsip-prinsip adalah

- a) Adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam sistem manajemen dan organisasi
- b) Adanya sistem akuntansi yang memadai dalam melaksanakan anggaran.
- c) Adanya penelitian dan analisis untuk menilai kinerja organisasi
- d) Adanya dukungan dan pelaksana mulai dari tingkat atas sampai yang paling bawah.

Persoalan penting dalam penyusunan anggaran adalah bagaimana memanfaatkan dana secara efektif dan efisien, mengalokasikan dana secara tepat sesuai dengan skala prioritas. Itu sebabnya dalam prosedur penyusunan anggaran memerlukan tahapan-tahapan yang sistematis yaitu sebagai berikut:

- a) Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama periode anggaran.
- b) Mengidentifikasi sumber-sumber yang dinyatakan dalam uang, jasa dan barang.
- c) Semua sumber dinyatakan dalam bentuk uang sebab anggaran pada dasarnya merupakan pernyataan finansial.
- d) Memformulasikan anggaran dalam bentuk format yang telah disetujui dan dipergunakan oleh instansi tertentu.
- e) Menyusun usulan anggaran untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang.
- f) Melakukan revisi usulan anggaran.
- g) Persetujuan revisi usulan anggaran.
- h) Pengesahan anggaran.

Secara khusus, anggaran rutin pendidikan untuk penyelenggaraan sekolah dasar didasarkan atas pendataan SD yang dikumpulkan, diolah, dan dianalisis yang selanjutnya disajikan sebagai bahan pertimbangan untuk pemberian dana bantuan dari pemerintah pusat. Langkah pendataan dilakukan dengan menggunakan format pendataan yang diisi langsung oleh kepala sekolah, selanjutnya dikumpulkan oleh tim Subsidi Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan (SBPP) tingkat kecamatan, selanjutnya dikumpulkan di kabupaten/ kota madya dan provinsi. Ketentuan pembiayaan pendidikan perlu didasarkan atas kebutuhan biaya penyelenggaraan pendidikan di setiap daerah yang didasarkan atas satuan biaya yang sama dan alokasi setiap daerah ditetapkan

berdasarkan jumlah sekolah, kelas, murid dan pegawai sekolah.

B. Penentuan Standarisasi Dalam Penganggaran Pendidikan

Jika skala prioritas dari kegiatan-kegiatan yang diusulkan sudah diketahui, langkah berikutnya adalah menentukan standarisasi yang berkaitan dengan besar kecilnya biaya yang akan dikeluarkan. Standarisasi dimaksudkan sebagai suatu batasan yang objektif tentang jenis, jumlah, dan mutu sumber daya yang dibutuhkan unit kerja pada tingkatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Misalnya, suatu wilayah membutuhkan jumlah dan mutu sarana pendidikan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Untuk memenuhi kebutuhan ini, harus diperhitungkan bahwa pembangunan suatu ruang kelas dengan standar sekian meter persegi dan kualitas tinggi akan membutuhkan biaya yang sangat besar dibanding dengan pembangunan ruang kelas yang sama dengan standar kualitas sedang rendah. Kuantitas dan kualitas ruang belajar, ruang-ruang administrasi, dan ruang penunjang yang dibutuhkan sekolah ditentukan oleh tipe sekolah. Semakin besar tipe sekolah semakin banyak dan semakin luas bangunan yang diperlukan. Begitu pula biaya yang dibutuhkan semakin besar.

Harga satuan bangunan sekolah yang merupakan tanggung jawab pemerintah (bagi gedung sekolah negeri) secara nasional ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Kualifikasinya dilakukan berdasarkan kualitas bahan dan pekerjaannya yaitu kualitas A, B, atau C. Harga bangunan per m² berbeda-beda baik di setiap provinsi maupun antar kabupaten atau kota madya. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan biaya transportasi dan harga bahan bangunan, termasuk juga upah buruh. Harga bahan bangunan sangat dipengaruhi oleh kemudahan sarana pengangkutan dan jarak tempuh.

Standarisasi pada umumnya dihubungkan dengan prosedur penganggaran yang harus diikuti yang dilandasi oleh hukum dan tata cara kerja yang beraturan. Standarisasi sangat membantu dalam penentuan harga. Ada beberapa keuntungan dari adanya standarisasi yaitu:

- a. Proses penganggaran menjadi lebih mudah, karena beban kerja dan perhitungan yang rumit akan lebih mudah dikerjakan.
- b. Tidak banyak waktu yang terbuang untuk menghitung dan memeriksa biaya yang diperlukan
- c. Perkiraan kebutuhan dan untuk setiap kegiatan yang sama akan seragam
- d. Pengalokasian dan realokasi dana menjadi lebih mudah
- e. Menghindari terjadinya manipulasi harga yang berdampak negative.

C. Bentuk-bentuk anggaran pendidikan

Anggaran mempunyai fungsi manajemen, baik dalam perencanaan maupun pengawasan. Bentuk-bentuk anggaran sangat menentukan karena tidak semua anggaran dirancang untuk melakukan fungsi manajemen. Dibawah ini akan disajikan bentuk-bentuk desain anggaran pendidikan.

a. Anggaran Butir Per Butir (*Line Item Budget*)

Anggaran butir per butir merupakan bentuk anggaran yang paling simpel dan banyak digunakan. Dalam bentuk ini, setiap pengeluaran dikelompokkan berdasarkan kategori-kategori. Misalnya, gaji, upah, honor menjadi satu kategori atau satu nomor dan pelengkapan, sarana, material dengan nomor yang selanjutnya.

b. Anggaran Program (*Program Budget System*)

Bentuk ini dirancang untuk mengidentifikasi biaya setiap program. Pada

anggaran biaya per butir di hitung berdasarkan jenis nomor yang akan dibeli, sedangkan pada anggaran program biaya dihitung berdasarkan jenis programnya. Misalnya, jika dalam anggaran butir per butir disebut gaji guru (nomor1), sedangkan dalam anggaran laporan disebut gaji untuk perencanaan pengajaran IPA hanyalah salah satu komponen, dan komponen lain yang termasuk program percobaan termasuk alat-alat IPA, bahan-bahan percobaan kimia dan sebagainya menjadi satu paket.

c. Anggaran Berdasarkan Hasil (Performance Budget)

Sesuai dengan namanya bentuk anggaran ini menekankan pada hasil bukan pada keterperincian dari suatu alokasi anggaran. Pekerjaan akhir dalam suatu program terpecah dalam bentuk beban kerja dan unit hasil yang dapat diukur. Hasil pengukurannya digunakan dipergunakan untuk menghitung masukan dana dan tenaga yang dipergunakan untuk mencapai suatu program.

d. Sistem Perencanaan Penyusunan Program Dan Penganggaran (Planning Programing Budgeting System atau S4)

Sistem ini merupakan kerangka kerja dalam perencanaan dengan mengorganisasikan informasi dan menganalisisnya secara sistematis. Dalam sistem ini, tiap-tiap tujuan suatu program dinyatakan dengan jelas, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam proses ini data tentang biaya, keuntungan, kelayakan suatu program disajikan secara lengkap sehingga pengambilan keputusan dapat menentukan pilihan program yang dianggap paling menguntungkan.

Kesimpulan

Kesimpulan dalam artikel ini adalah bahwa pembiayaan pendidikan pada

dasarnya menitikberatkan pada upaya pendistribusian benefit pendidikan dan beban yang harus ditanggung masyarakat. Dengan menggunakan konsep dasar penganggaran pembiayaan yang memuat karakteristik, prinsip dan fungsi anggaran pendidikan dengan menerapkan standarisasi dalam penganggaran biaya pendidikan. Standarisasi dimaksudkan sebagai suatu batasan yang objektif tentang jenis, jumlah, dan mutu sumber daya yang dibutuhkan unit kerja pada tingkatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BIBLIOGRAFI

- Aditya, O., & Qomariyah, V. F. (2020). Implementasi Information And Technology (IT) Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) Pada Kelas VII F SMPN 2 Gunung Jati Kabupaten Cirebon. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(7), 439–450.
- Cholik, C. A. (2017). Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Untuk Meningkatkan Pendidikan Di Indonesia. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 2(6), 21–30.
- Fattah, N. (2000). Ekonomi dan pembiayaan pendidikan. *Bandung: Remaja Rosdakarya*, 78(1).
- Harianti, D. (2020). Strategi Guru Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Pada Peserta Didik Di Apple Tree Pre-School Lombok. *Jurnal Syntax Transformation*, 1(5), 103–110.
- Mac Donald, N. V., & Lawton, P. J. (1977). Improving Management Performance: The Contribution of Productivity. Dalam: A. Djamaludin. *Teknik Penyusunan Skala Pengukur*.
- Mairani, C. (2019). *Strategi Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Kinerja Guru di MTs Al-Manar*

Tembung. Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara.

Saepudin, A. (2018). Konsep Pendidikan Karakter dalam Perspektif Psikologi dan Islam. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 3(1), 11–20.

Wicaksono, B., Puluhulawa, F. U., & Kasim, N. M. (2020). Optimalisasi Peran Balai Pemasarakatan Dalam Melakukan Pembimbingan Klien Pemasarakatan. *Jurnal of Admiration*, 1(3), 130–140.

Copyright holder :
Abdul Wakhid (2020).

First publication right :
Jurnal Syntax Transformation

This article is licensed under:

